



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, Pengawas Internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan . . .

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, Pengawas Internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan . . .

- a. Melakukan reviu atas pencapaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



Achmad Djamaludin
ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Tugas : Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Fungsi : 1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
 2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan
 3. Penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional	
		Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti	
		Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang dilaporkan	
		Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		Persentase rumusan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang dilaporkan	
2.	Terwujudnya Wantannas yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
Opini Badan Pemeriksa Keuangan			
Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan Ketahanan Nasional			

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI



**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional dan internasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis nasional	Jumlah Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis nasional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan strategis nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis regional	Jumlah Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis regional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis regional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis regional yang dihasilkan	

3. Terumuskannya . . .

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan strategis regional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis regional yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya saran kebijakan lingkungan strategis internasional	Jumlah saran kebijakan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis internasional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan strategis internasional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara	Jumlah rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang pemerintahan negara	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang pemerintahan negara	Jumlah kajian kerjasama bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang lingkungan alam	Jumlah rancangan kebijakan bidang lingkungan alam yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang lingkungan alam	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan alam	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan alam yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang lingkungan sosial	Jumlah rancangan kebijakan bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang lingkungan sosial	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan sosial	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah rancangan kebijakan bidang lingkungan informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah kajian kerjasama bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional dan rencana kontinjensi yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase perumusan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan yang disiapkan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan	
		Persentase kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang politik nasional	Jumlah rancangan kebijakan bidang politik nasional yang dihasilkan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang politik nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang politik nasional yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang strategi nasional	Jumlah rancangan kebijakan bidang strategi nasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi risiko pembangunan nasional	Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi risiko pembangunan nasional	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang strategi nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontinjensi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional	Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan nasional yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Ekonomi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan ekonomi	Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang ekonomi yang dihasilkan	

2. Terumuskannya . . .

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi	Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang ekonomi	Jumlah kajian kerjasama bidang ekonomi yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan sosial budaya yang tangguh dan dinamis	Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang sosial budaya yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya	Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang sosial budaya	Jumlah kajian kerjasama bidang sosial budaya yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang pertahanan dan keamanan	Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan	Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang pertahanan dan keamanan	Jumlah kajian kerjasama bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkan	

STAF AHLI

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Meningkatnya kehandalan telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh dan dinamis	Jumlah telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan	

BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan di Setjen Wantannas	
		Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas yang terlaksana	
2.	Terlaksananya layanan organisasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian proses bisnis dan layanan penataan organisasi	
3.	Tersusunnya RPerpres Dewan Keamanan Nasional	Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional yang dihasilkan	
4.	Terlaksananya layanan keuangan yang berkualitas	Persentase penyerapan anggaran Setjen Wantannas	
		Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan	

5. Terlaksananya . . .

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
5.	Terlaksananya layanan reformasi birokrasi	Nilai penerapan reformasi birokrasi Wantannas	
6.	Terlaksananya layanan perkantoran (gaji)	Persentase pembayaran gaji tepat waktu	

BIRO PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI DAN PENGAWAS INTERNAL

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan persidangan, dan kehumasan	Peringkat keterbukaan informasi publik	
		Jumlah sidang Dewan Ketahanan Nasional yang terlaksana	
2.	Terlaksananya layanan data dan informasi yang optimal	Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan data dan informasi	
3.	Terlaksananya layanan pengawasan internal yang berkualitas	Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)	
		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
		Nilai zona Integritas (ZI)	

BIRO UMUM

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas	
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	
2.	Terlaksananya layanan manajemen (Barang Milik Negara) BMN yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel	
		Kategori kualitas pengelolaan BMN	
3.	Terlaksananya layanan protokoler yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan layanan protokoler yang efektif dan efisien	
		Indeks Hasil Pengawasan Arsip	
4.	Terlaksananya layanan umum	Persentase pelaksanaan layanan umum yang handal dan berkualitas	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
5.	Terlaksananya layanan perkantoran yang berkualitas	Persentase layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas	

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSANA MADYA TNI

